

## DAFTAR REFERENSI

### Buku:

- Achmadi, A., Narbuko. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggara, S. (2016). *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setya.
- Arikunto. (2011). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharma, S. (2005). *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kurniawan, R. (2016). *Analisis Regresi, Dasar dan Penerapannya dalam R*. Jakarta: Kencana.
- Markus, M. (2005). *Perpajakan Indoneia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, S. P., & Jugde, T. A. (2013). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Siahaan, M. P., (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V. W., (2022). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulaiman, W (2004). *Analisis Regresi Menggunakan SPSS Contoh Kasus Dan Pemecahannya*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sutopo, Y. (2017). *Statistika Inferensial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Waluyo. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia group.

**Jurnal:**

Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Universitas Harapan Medan*.

Caroko, B., Susilo, H., & Zahroh, Z.A. (2015) Pengaruh pengetahuan perpajakan, orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal JEJAK Universitas Brawijaya*.

Chau, G., & Leung, P. (2009). A Critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation, Academic Journals*.

Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*.

Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*.

Rahayu, C., & Amirah, M. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes). *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*.

Saragih, F. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.

Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014.

Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua.

Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**Situs Web:**

Antara Kepri (21 September 2022). *Tunggakan Pajak Kendaraan di Kepri capai Rp146,4 miliar*. Dikutip Januari, 17 2023 dari antara Kepri: <https://kepri.antaranews.com/berita/132669/tunggakan-pajak-kendaraan-di-kepri-capai-rp1464-miliar>

Publikasi Online BPS Kota Batam, (2022, Februari 25). *Kota Batam dalam angka 2022*. <https://batamkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/be4b5274297b1accccb70a9b/kota-batam-dalam-angka-2022.html>.

Tribun Batam. (2021, Juni 24). *Pemutihan Pajak Kendaraan 2021 di Kepri Berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September*. Dikutip Februari, 21 2022, dari Tribun Batam: <https://batam.tribunnews.com/2021/06/24/pemutihan-pajak-kendaraan-2021-di-kepri-berlaku-mulai-1-juli-hingga-30-september>.

Website Resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BAPENDA Provinsi Kepri). <http://dispenda.kepriprov.go.id/>.

Website Resmi Badan Pusat Statistik Kota Batam. <https://batamkota.bps.go.id/>.

Website Resmi SAMSAT Batam Centre (UPTD-PPD Batam Centre). <http://samsatbatamcentre.kepriprov.go.id>.